

The Stakeholders' Collaborative Toward the Community Empowerment Based on Village Tourism in the Melung Village

Kolaborasi Stakeholders dalam Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Desa Wisata di Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng

Indah Ayu Permana Pribadi¹, Dian Nastiti²

^{1,2} Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto

Abstrak:

Sejak 2017, Desa Melung berkolaborasi dengan BUMDes Melung untuk mengembangkan objek wisata Pagubugan sebagai inisiasi berdirinya Desa Wisata Melung. Saat ini, Desa Melung mulai merambah ke sektor wisata lainnya seperti; wisata budaya, wisata kuliner dan wisata edukasi. Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana kolaborasi *stakeholders* dalam proses pemberdayaan masyarakat berbasis desa wisata di Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Melung dan *stakeholders* yang terkait. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa kolaborasi antar *stakeholders* dalam pemberdayaan masyarakat berbasis desa wisata di Desa Melung kecamatan Kedungbanteng sudah berjalan dengan baik walau ada beberapa kendala seperti; kurangnya partisipasi masyarakat. Dalam hal ini, *stakeholders* yang terkait tetap melakukan upaya untuk peningkatan partisipasi masyarakat dengan mengadakan berbagai pelatihan untuk menunjang berkembangnya Desa Wisata Melung.

Kata-Kata Kunci: Desa Wisata, Kolaborasi, *Stakeholders*, Melung, Banyumas

Abstract:

Melung Village have collaborated with BUMDes Melung to develop the Pagubugan tourist attraction as the initiation of Melung Tourism Village. Currently, Melung Village is expanding to other tourism sectors such as cultural tourism, culinary tourism, and educational tourism. This research was conducted to see how stakeholder collaboration in the process of community empowerment based on tourism villages in Melung Village. This research used a qualitative case study approach. Key informants in this study were the Head of Melung Village and related stakeholders. The results of this study explain that collaboration among stakeholders in community empowerment based on tourism villages in Melung Village, Kedungbanteng sub-district has been running well despite some obstacles such as the lack of community participation. In this regard, related stakeholders continue to make efforts to improve community participation by conducting various training to support the development of Melung Tourism Village.

Keywords: Village Tourism, Collaboration, *Stakeholders*, Melung, Banyumas

Korespondensi:

Indah Ayu Permana Pribadi, indahayupermanap@gmail.com

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki berbagai kekayaan alam hayati dan budaya. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang turut berperan dalam perkembangan pariwisata di Indonesia. Selain itu, pariwisata juga dinilai sebagai lokomotif pergerakan sektor ekonomi di Indonesia (Humas Kemensetneg, 2019). Berdasarkan data dari Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif, tercatat bahwa sejak tahun 2013 – 2019 pendapatan devisa negara dari sektor pariwisata terus meningkat dan sempat turun di tahun 2020 karena efek pandemi Covid-19. Namun, saat ini sektor pariwisata sudah bangkit dengan pendapatan devisa hingga 769,39% atau US\$4,26 miliar.

Pariwisata di Indonesia diharapkan mampu menjadikan masyarakat berdaya, khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah wisata. Perkembangan model pariwisata di Indonesia saat ini telah sampai pada pariwisata berbasis desa wisata (Prafitri & Damayanti, 2016). Program Visit Indonesia pada tahun 2007 merupakan salah satu pioner dalam upaya pengembangan desa wisata. Hal ini diperkuat dengan upaya pemerintah dalam rangka percepatan pengembangan desa secara terpadu yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Suherlan et al., 2022).

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memberdayakan potensi ekonomi harus dimulai dari desa. Hal itu dilakukan karena sebagian besar angkatan kerja berpendidikan rendah ada di desa (Noorsy, 2007). Rendahnya angka pendidikan dan kesejahteraan masyarakat di desa membuat desa harus berinovasi, salah satunya dengan mengembangkan potensi desa wisata. Menparekraf, Sandiaga Uno mengatakan bahwa kehadiran desa wisata akan memperkuat ketahanan sosial, ekonomi dan budaya di desa, serta dapat dijadikan salah satu upaya untuk mensejahterakan dan membuat desa menjadi lebih mandiri.

Pemberdayaan masyarakat berbasis desa wisata bisa menjadi salah satu pilihan yang dilakukan oleh desa. Pemberdayaan Masyarakat berbasis Desa Wisata telah banyak dikembangkan oleh desa-desa di Indonesia, ini merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa untuk

mengembangkan potensi dan meningkatkan kualitas desa (Mulyana et al., 2022). Namun, pemasaran pada sektor pariwisata, khususnya desa wisata menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah desa dan *stakeholders* yang terlibat di dalamnya (Itah Masitah, 2019). Desa wisata bukan hanya tentang bertambahnya objek wisata yang harus dikelola oleh desa. Lebih luas lagi, desa wisata melihat tentang bagaimana fasilitas yang diberikan, ragam wisata dan budaya, jasa pemandu wisata dan lain sebagainya. Pengembangan desa wisata membutuhkan keaktifan masyarakat lokal sebagai penggerak utama dalam kegiatan pariwisata di desa tersebut (Suherlan et al., 2022).

Menurut UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Desa wisata merupakan suatu daerah tujuan wisata atau disebut pula destinasi pariwisata, yang mengintegrasikan daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Kemudian, Suwanto juga mengemukakan bahwa desa wisata merupakan suatu wilayah pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan, baik tata ruang, arsitektur bangunan, maupun pola kehidupan sosial budaya masyarakat, adat istiadat keseharian (Atok et al., 2022). Artinya, untuk menawarkan produk wisata dalam sebuah desa membutuhkan sinergi antara wisata yang ditawarkan, fasilitas, pelayanan dan bagaimana kinerja *stakeholders* yang terkait seperti pemerintah desa, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), akademisi, sektor swasta dan lain sebagainya.

Kabupaten Banyumas merupakan salah satu wilayah di Jawa Tengah yang memiliki 21 Desa Wisata di tahun 2022. Analis Objek Wisata dari Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Dinporabudpar) Kabupaten Banyumas mengatakan, bahwa nantinya dari 21 Desa Wisata akan diarahkan sesuai dengan potensi dan ciri khas di setiap desa. Tujuannya agar masing-masing desa wisata memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Beberapa ciri khas yang diunggulkan antara lain dari sisi wisata budaya, wisata alam, wisata religi dan lain sebagainya.

Salah satu Desa Wisata yang menonjolkan wisata alamnya di Kabupaten Banyumas adalah Desa Melung. Melung merupakan salah satu Desa di

Kabupaten Banyumas yang berada di kaki Gunung Slamet dan menjadi jalur wisata menuju Kawasan Baturraden dan Bukit Tranggulasih. Keberadaannya sebagai desa penyangga membuat Pemerintah Desa Melung berupaya untuk menjadi salah satu destinasi wisata seperti desa-desa di sekitarnya. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil. Berdasarkan data dari *website* Jaringan Desa Wisata (JaDesTa) Kemeparekraf saat ini Desa Melung termasuk salah satu dari 3638 Desa Wisata yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan predikat Desa Wisata Berkembang.

Pemberdayaan masyarakat memiliki beberapa upaya pembinaan yang harus dilakukan oleh pemerintah desa, agar program pemberdayaan masyarakat berjalan dengan baik. Menurut Mardikanto dan Poerwoko (2015) ada 4 upaya pembinaan yang dapat dilakukan untuk memenuhi hal tersebut, diantaranya adalah Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan dan Bina Kelembagaan (Mardikanto & Soebiato, 2015). Dalam hal ini, masyarakat juga memiliki peran penting dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat di desanya, karena masyarakat bukan hanya menjadi objek tetapi juga subjek (Kushandajani & Permana, 2020).

Menghadirkan masyarakat yang bukan hanya menjadi objek tetapi juga subjek dari proses pemberdayaan masyarakat berbasis desa wisata merupakan salah satu tujuan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Melung dalam mengembangkan Desa Wisata Melung. Desa Wisata Melung mulai dikembangkan pada tahun 2017. Pemerintah Desa Melung memulai dengan mengembangkan potensi wisata alam Pagubugan, kemudian mengembangkan potensi wisata budaya seperti; lengger dan ebeg, ada juga wisata edukasi seperti mengajak wisatawan untuk belajar proses pembuatan kopi serta tanaman hias. Dalam upaya pengembangan desa wisata tersebut, tentu saja banyak membutuhkan kerjasama, bukan hanya dari Pemerintah Desa, tetapi juga BUMDes, Pokdariwis dan seluruh lapisan masyarakat. Partisipasi yang baik dari seluruh *stakeholders* yang terkait akan membantu Desa Melung menjadi Desa Wisata yang semakin berkembang.

Sjaifudian dalam Berliandaldo (2019) mengatakan bahwa *Stakeholders* merupakan individu, kelompok organisasi baik laki-laki ataupun perempuan yang memiliki kepentingan, terlibat atau dipengaruhi oleh suatu program

kegiatan pembangunan (Berliandaldo et al., 2021). Kolaborasi *stakeholders* merupakan suatu proses kerjasama yang dilakukan oleh berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang sama untuk mencapai tujuan yang sama pula. Kolaborasi *stakeholders* dalam pengelolaan Desa Wisata Melung dilakukan melalui Proses Pemberdayaan Masyarakat yang mempunyai tujuan akhir yaitu kemandirian, kesejahteraan masyarakat serta peningkatan perekonomian desa. Kolaborasi *stakeholders* di Desa Melung belum melibatkan pihak-pihak diluar desa seperti Investor dan lain sebagainya. Bagi Pemerintah Desa Melung, proses yang harus dilakukan untuk menuju masyarakat desa yang berdaya adalah membangun kepercayaan dalam diri masyarakat bahwa mereka akan sejahtera dan berdaya jika bisa bersama-sama membangun desa melalui potensi yang ada. Selain itu, Pemerintah Desa Melung beserta *stakeholders* yang terkait dalam pengelolaan Desa Wisata Melung menganggap bahwa, bekerjasama dengan pihak swasta bisa menimbulkan dampak negatif yang tidak bisa di prediksi oleh mereka.

Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana kolaborasi *stakeholders* dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata, khususnya di Desa Wisata Melung, Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menjadi menarik karena dalam melakukan pengembangan desa wisata, Pemerintah Desa Melung mempunyai tujuan untuk memberdayakan masyarakat tanpa ada bantuan dari pihak ke tiga. Artinya, Pemerintah Desa Melung bekerjasama dengan BUMDes dan Pokdarwis melibatkan masyarakat bukan hanya sebagai objek tetapi juga sebagai subjek dalam pengembangan Desa Wisata Melung.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian studi kasus. Studi kasus merupakan teknik penelitian yang digunakan untuk menganalisa persoalan dari multi perspektif yaitu perspektif organisasi, situasi, kejadian, dan proses, dengan menjawab pertanyaan penelitian “bagaimana” dan “mengapa”(Yin, 1994). Penelitian ini menggunakan pengambilan data *in-depth* seperti; interview dan observasi.

Key Informant dalam penelitian ini merupakan *stakeholders* yang terkait dalam proses pembentukan Desa Wisata Melung, diantaranya; kepala desa,

pamong/ perangkat desa, pokdarwis BUMDes, dan masyarakat. Data yang peneliti dapatkan akan diolah dan diidentifikasi menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* untuk studi kasus dipilih karena masing-masing informan memiliki karakteristik dan opini atau perilaku khusus dalam menggambarkan fenomena yang terjadi (Cooper & Schindler, 2007). Dalam hal ini, peneliti meyakini, bahwa masing-masing informan memiliki opini yang berbeda dalam menggambarkan peristiwa yang terjadi di Desa Melung, khususnya dalam pengembangan Desa Wisata Melung. Masing-masing informan memiliki aspek keahliannya yang diterapkan dalam pengembangan Desa Wisata Melung ini. Kemudian, peneliti dapat menemukan informan yang paling memiliki kekayaan informasi. Hal ini akan membuat peneliti mendapatkan pandangan komprehensif dari berbagai sudut pandang informan (Kushandajani & Permana, 2020). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Miles dan Huberman sebagai berikut: Reduksi data; penyajian data dan verifikasi atau kesimpulan (Sugiyono, 2016).

Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Desa Wisata

Tren Pariwisata baru-baru ini turut menunjang potensi berkembangnya Desa Wisata di Indonesia. Perubahan dari wisata masal (destinasi populer) menuju wisata alternatif (kembali ke alam, berinteraksi dengan masyarakat) merupakan salah satu keuntungan bagi pariwisata desa (Wirdayanti et al., 2021). Wisata alternatif berkaitan dengan wisata yang berorientasi pada alam, budaya lokal dan lain sebagainya yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan pengunjung, petualangan dan lain sebagainya (Wirdayanti et al., 2021). Berdasarkan pandangan tersebut dapat kita simpulkan bahwa potensi desa wisata sebenarnya sangatlah besar dan bisa berdampak pada kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi desa dan masyarakatnya. Hal ini juga membuat banyak desa turut berlomba-lomba dalam menggali potensi pariwisata di desa, tidak terkecuali Desa Melung.

Desa Melung merupakan desa yang berada di kaki Gunung Slamet. Saat ini, Desa Melung di pimpin oleh seorang Kepala Desa bernama Khoirudin. Ia sudah menjabat selama dua periode, yakni 2013-2019 kemudian 2019-2025. Selama kepemimpinannya, beliau terus berinovasi dan menggali potensi desa. Tujuannya untuk membuat masyarakat menjadi sejahtera, oleh karenanya

Pemerintah Desa Melung lebih memilih untuk membangun desa bersama masyarakat setempat dibandingkan bekerjasama dengan pihak lain. Salah satu potensi yang dikembangkan di Desa Melung adalah sektor pariwisata. Mulai 20 Maret 2020 yang lalu, Desa Melung sudah menjadi salah satu Desa Wisata di Kabupaten Banyumas dengan status berkembang (Keputusan Bupati Banyumas Nomor 556/167/Tahun2020, 2020).

Menurut Kemenparekraf ada 4 tahapan dalam membangun desa wisata. Pertama, Desa Wisata dengan status “Rintisan” ini merupakan tahap awal pengembangan desa wisata, dimana masih belum terdapat kunjungan wisatawan, kesadaran masyarakatnya juga masih rendah, sarana dan prasarana terbaatas namun desa sudah memiliki potensi wisata yang harus dikembangkan. Kedua, merupakan tahap “Berkembang”, pada tahapan ini desa sudah mulai dikunjungi wisatawan, dan destinasi wisata di desa tersebut sudah dikembangkan, namun belum dikelola dengan baik. Ketiga, tahapan selanjutnya adalah desa wisata dengan status “Maju” artinya pada tahap ini kesaran masyarakatnya sudah bagus, memiliki kelompok pengelola dan wilayahnya sudah dikunjungi wisatawan dari berbagai wilayah. Keempat, ini merupakan tahapan terakhir, yaitu “Mandiri”, dimana desa wisata sudah memiliki inovasi di bidang pariwisata dari masyarakat, selain itu sarana prasarananya memiliki standar kualitas yang baik, desa juga sudah melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, bukan hanya masyarakat saja tetapi juga dengan pelaku bisnis pariwisata, akademisi, dan media.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa Desa Melung termsuk desa wisata dengan status berkembang yang artinya Desa Melung sudah memiliki banyak wisatawan yang berkunjung ke desanya dan destinasi wisata yang ada di Desa Melung juga sudah berkembang. Hal ini dibuktikan dengan penuturan dari Direktur BUMDes Melung yang mengelola salah satu objek wisata alam yaitu Pagubugan, yang dari tahun ke tahun turut menyumbang Pendapatan Asli Desa yang cukup besar. Pada tahun 2021 lalu, BUMDes Melung mendapatkan Rp. 90 Juta hanya dari objek wisata Pagubugan saja.

Info grafis dari akun Instagram Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menyebutkan bahwa Jawa Tengah memiliki 818 Desa Wisata dan 631 diataranya sudah mendapatkan bantuan. Bantuan yang diberikan bervariasi, sesuai dengan

status desa wisata yang dimilikinya. Desa Wisata Maju mendapatkan bantuan 1 Miliar Rupiah, Desa Wisata Berkembang mendapatkan bantuan Rp. 500 Juta, dan Desa Wisata Rintisan mendapatkan bantuan Rp. 100 Juta. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Kepala Desa Melung, dikatakan bahwa Desa Melung pernah mendapatkan bantuan dari Pemerintah Jawa Tengah pada Tahun 2021 sebesar Rp.500 Juta rupiah dan digunakan untuk pengembangan objek wisata pagubugan, seperti untuk memperbaiki akses, menambah gazebo dan lain sebagainya.

Desa Wisata merupakan suatu model pengembangan wisata dengan memanfaatkan potensi dalam bentuk pengembangan pariwisata dengan tetap memperhatikan aspek kehidupan yang sudah ada (Atok et al., 2022). Tanpa mengurangi nilai-nilai kearifan lokal masyarakatnya, desa wisata dapat menjadi alternatif baru yang ditawarkan untuk wisatawan yang berkunjung ke Indonesia. Desa wisata bukan hanya mengajak wisatawan untuk menikmati keindahan alam saja, namun wisatawan juga dapat mempelajari dan mengenal secara langsung tentang bagaimana kehidupan masyarakat pedesaan (Itah Masitah, 2019).

Desa Melung melalui Badan Usaha Milik Desa Melung (BUMDes Melung) mulai merintis berdirinya desa wisata pada tahun 2017. Hal ini dimulai dengan pengembangan sektor pariwisata alam di Desa Melung. Objek wisata yang pertama kali didirikan oleh BUMDes Melung untuk pengembangan sektor pariwisata adalah Pagubugan. Berdasarkan penuturan Kepala Desa Melung, Khoirudin, Objek Wisata Pagubugan di bangun di atas tanah milik desa. Luas tanah desa yang digunakan sekitar 4,3 hektar dan BUMDes Melung menyewa 10% dari tanah desa untuk mengembangkan wisata alam pagubugan. Biaya sewa yang dikeluarkan oleh BUMDes adalah 30% dari pendapatan BUMDes melalui objek wisata Pagubugan dalam satu tahun dan biaya sewa tersebut masuk ke dalam PADes Melung. Awalnya, pagubugan merupakan objek wisata alam yang menawarkan pemandangan di tengah sawah dengan corak batu warna-warni dan persawahan terasering. Namun, objek wisata ini terus berkembang dan menambahkan beberapa fasilitas lainnya seperti; pendopo pagubugan, warung-warung makanan, petilasan leluhur desa, tempat sesajen petani, *spot selfie* di tengah sawah dan kolam renang di tengah sawah yang saat ini menjadi salah satu *icon* pariwisata di Desa Melung.

Menjadikan Desa Melung sebagai salah satu desa wisata yang ada di Kabupaten Banyumas bukanlah suatu hal yang mudah, karena konsep desa wisata bukan hanya sekedar memiliki objek wisata yang potensial. Lebih dari itu, sarana dan prasarana desa juga harus tetap dijaga dengan baik, supaya desa dapat memberikan fasilitas serta pelayanan yang baik bagi wisatawan. Sarana dan prasarana yang di maksud seperti; akses menuju lokasi wisata, toilet, kebersihan, tempat ibadah, *homestay* dan lain sebagainya. Selain itu, faktor lain yang sangat penting adalah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan desa wisata ini.

Selain terbuka untuk wisatawan yang akan berkunjung ke berbagai destinasi wisata secara mandiri, Desa Melung juga menawarkan paket wisata untuk wisatawan yang terdiri dari wisata alam (pagubugan), wisata edukasi (sementara tentang memanen biji kopi dan mengolahnya), dan wisata budaya (lengger, ebeg dan ruwat bumi (sesuai dengan periodenya)). Selain itu, wisatawan juga bisa menginap di *homestay* yang menjadi salah satu fasilitas yang juga dikelola oleh masyarakat desa. Paket wisata ini lebih banyak diminati oleh kelompok atau komunitas yang sedang melakukan *gathering* atau studi banding desa wisata yang biasa dilakukan oleh jaringan desa wisata di Indonesia.

Menurut Wrihatnolo sejatinya konsep pemberdayaan masyarakat mencakup tiga hal yang penting; *community development* atau pembangunan masyarakat serta *community-based development* atau pembangunan yang bertumpu pada masyarakat dan yang terakhir *community driven development* yang diterjemahkan sebagai pembangunan yang dijalankan oleh masyarakat (Atok et al., 2022). Pemerintah Desa Melung mencoba untuk menjalankan pemberdayaan masyarakat berbasis desa wisata dengan bertumpu pada masyarakat, dilakukan oleh masyarakat dan hasilnya pun untuk kesejahteraan masyarakat Desa Melung sendiri.

Masyarakat yang merupakan salah satu *stakeholders* dalam pengembangan Desa Wisata Melung dilibatkan dalam proses pemasaran, pengelolaan parkir serta mengelola *homestay*. Bagi masyarakat desa yang memiliki keterampilan khusus seperti mengelola tanaman dan membuat kopi dilibatkan dalam program wisata edukasi yang dikelola oleh Pokdarwis. Kemudian, Desa Melung juga menyediakan wisata budaya yang dilakukan oleh kelompok seni lengger dan ebeg yang juga dikelola oleh Pokdarwis. Menurut

penuturan Sekretaris Desa Melung sekaligus pegelola Pokdarwis Melung. Timbul Yulianto, saat ini Desa Melung juga sedang berupaya untuk menjalin kerjasama dengan pengelola Gua Maria Melung untuk pengembangan wisata religi.

Kolaborasi *Stakeholders* dalam Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat berbasis Desa Wisata banyak dikembangkan oleh desa-desa di Indonesia, ini merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa untuk mengembangkan potensi dan meningkatkan kualitas desa (Mulyana et al., 2022). Pengembangan potensi dan kualitas desa dalam proses pemberdayaan masyarakat berbasis desa wisata dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan bekerjasama dengan berbagai pihak untuk membantu sesuai dengan bidang kemampuannya. Pemerintah desa tidak bisa hanya bekerja dengan mengandalkan perangkat desanya saja, mereka harus melakukan kolaborasi dengan berbagai *stakeholders*.

Sjaifudian dalam Berliandaldo (2019) mengatakan bahwa *Stakeholders* merupakan individu, kelompok organisasi baik laki-laki ataupun perempuan yang memiliki kepentingan, terlibat atau dipengaruhi oleh suatu program kegiatan pembangunan (Berliandaldo et al., 2021). *Stakeholders* dalam hal ini merujuk kepada individu atau kelompok yang tergabung dalam kegiatan pengelolaan desa wisata seperti; Kelompok sadar wisata, Badan Usaha Milik Desa, Akademisi, dan yang tidak kalah penting yaitu masyarakat sekitar. Dalam hal ini, masing-masing *stakeholders* yang terlibat memiliki kepentingan yang sama untuk membangun kesejahteraan ekonomi dan sosial dari masyarakat Desa Melung dengan cara mengembangkan potensi desa khususnya desa wisata.

Partisipasi masyarakat berperan sangat penting dalam proses pemberdayaan masyarakat berbasis desa wisata ini. Salah satu tujuan dari desa wisata adalah menanamkan nilai-nilai kearifan lokal yang ada di desa tersebut, dan masyarakat merupakan kelompok yang paling tepat untuk ada di dalamnya. Upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Melung dalam hal ini adalah dengan mengadakan pelatihan-pelatihan terkait desa wisata yang bisa meningkatkan nilai jual masyarakat dan partisipasi masyarakatnya.

Dalam proses pemberdayaan masyarakat, kolaborasi antar *stakeholders* ini harus terjalin dengan baik agar mereka tetap pada satu tujuan. Salman dalam

Ciptaningsih (2019), mengatakan bahwa setidaknya dalam kolaborasi harus mengandung unsur-unsur pembangunan yang dapat disinergikan seperti; sumber daya, organisasi dan norma (Ciptaningsih & Nurcahyanto, 2019). Sumber daya terdiri dari pendataan jenis, jumlah, serta finansial manusia hingga sumberdaya fisik yang dimiliki, kemudian organisasi adalah pelaku yang melaksanakan peran dengan cara memadukan dan mengintegrasikan berbagai sumberdaya, dan yang terakhir yaitu norma yang merupakan sesuatu yang berkaitan dengan nilai-nilai atau prinsip yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan (Ciptaningsih & Nurcahyanto, 2019). Dengan adanya sinergi dari ketiga aspek tersebut, kolaborasi antar *stakeholders* yang terjadi dalam proses pemberdayaan masyarakat akan lebih terarah dan jelas antara pembagian peran dan fungsi masing-masing *stakeholder*.

Pemerintah Desa Melung telah mengupayakan untuk meningkatkan sumberdaya manusia dengan mengadakan berbagai pelatihan seperti; pelatihan tentang mengelola *homestay*, mengolah biji kopi dan merawat tanaman hias. Selain itu mereka juga meningkatkan kreativitas warga dengan mengundang pelatih untuk kelompok kesenian desa. Keterlibatan masing-masing *stakeholder* di dalam proses pemberdayaan masyarakat berbasis desa wisata di Desa Melung memang tidak akan sama. Dalam melakukan kolaborasi, masing-masing *stakeholders* memiliki peran dan fungsi yang berbeda, beberapa dari mereka memiliki kontribusi yang tinggi, beberapa lagi memiliki kontribusi yang rendah. Hal ini juga bisa diidentifikasi dari kekuatan serta minat mereka dalam proses pemberdayaan masyarakat berbasis desa wisata di Desa Melung itu sendiri (Djamaludin, 2017).

Tabel 1. Identifikasi Stakeholders

| No | <i>Stakeholders</i> | Peran |
|----|--|---|
| 1. | Pemerintah Desa (Kepala Desa beserta jajarannya) | Bertugas untuk memberikan fasilitas sarana dan prasarana serta pelatihan bagi masyarakat dan melakukan kontrol terhadap program-program yang sudah berjalan. |
| 2. | Kelompok Sadar Wisata Desa Melung (Pokdarwis) | Menjalankan program-program pemberdayaan masyarakat desa berbasis desa wisata, turut mendampingi pelatihan kepada masyarakat, melakukan inovasi untuk pengembangan desa wisata di Desa Melung. |
| 3. | Badan Usaha Milik Desa Melung (BUMDes) | Melakukan inovasi untuk pengembangan desa wisata di Desa Melung, melakukan pemasaran untuk wisata alam Desa Melung, serta bertanggungjawab untuk pengelolaan keuangan wisata alam Pagubugan. |
| 4. | Masyarakat Desa Melung | Mengelola <i>Home Stay</i> , pengembangan diri (pelatihan mengelola kopi, tanaman hias dan pelatihan kesenian budaya seperti ebeg dan lengger), serta turut berpartisipasi dalam menjaga sarana dan prasarana desa. |

| | | |
|----|--|---|
| 5. | Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas | Melakukukan <i>check and balance</i> terhadap pengelolaan desa wisata dan memberikan masukan untuk kemajuan desa wisata. |
| 6. | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Melakukan <i>check and balance</i> serta memberikan fasilitas <i>website</i> JaDesTa (Jaringan Desa Wisata) sebagai salah satu upaya pemasaran desa wisata di Indonesia. |
| 7. | Akademisi | Sebagai fasilitator yang memberikan saran/ masukan untuk inovasi desa dengan cara melakukan pengabdian masyarakat di Desa Melung. Beberapa Universitas yang sudah pernah terlibat dalam proses pemberdayaan masyarakat di Desa Melung adalah; STT Telkom Purwokerto dan Jurusan Hubungan Internasional UNSOED Purwokerto. |

Sumber: Diolah dari data wawancara dengan Kepala Desa Melung, Direktur BUMDes dan Pokdarwis Melung.

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa, setiap *stakeholders* berperan sesuai dengan bidang mereka di dalam proses pemberdayaan masyarakat berbasis desa wisata di Desa Melung. Dalam hal ini, Pemerintah Desa Melung bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, Kementerian Pokdarwis, BUMDes, Akademisi dan masyarakat desa. Pemerintah Desa berperan sebagai pendamping dan pemberi fasilitas untuk Pokdarwis dan BUMDes dalam rangka pengembangan Desa Wisata di Desa Melung. Pokdarwis dan BUMDes memiliki

peran yang setara dalam proses pengembangan Desa Wisata Melung, namun BUMDes lebih fokus untuk inovasi dan pengembangan wisata alam Pagubugan serta melatih kelompok masyarakat untuk bisa melakukan pemasaran wisata di media sosial dan pengelolaan keuangan Pagubugan sedangkan Pokdarwis lebih fokus kepada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Desa Wisata Melung. Hal tersebut tidak pernah lepas juga dari pengawasan Kemudian, Pemerintah Daerah dan Kementerian Pariwisata berperan dalam hal menyediakan anggaran dan melakukan *check and balance*. Selain itu, ada juga website jejaring desa wisata atau JaDesTa yang memang di rancang oleh Kemenparekraf untuk memfasilitasi desa wisata dalam pemasaran produk wisatanya. Desa Melung termasuk salah satu desa yang tergabung dalam jaringan tersebut. Dalam *website* tersebut, Desa Melung memasarkan beberapa produk unggulan desanya seperti; alat memasak, sayuran organik, olahan makanan dan lain sebagainya. Dalam *website* tersebut juga dituliskan wisata apa saja yang disediakan oleh Desa Melung, seperti; wisata alam pagubugan, wisata budaya lengger, ebeg dan ruwat bumi, ada juga berbagai pilihan *homestay* dan paket wisata desa.

Pemerintah Desa Melung melakukan kolaborasi dengan berbagai macam *stakeholders* yang memang menguasai bidangnya masing-masing. Desa Melung memilih untuk tidak bekerjasama dengan pihak swasta, guna mengurangi beberapa dampak negatif yang mungkin terjadi, contohnya; perbedaan pemikiran/ visi misi, kurangnya keterlibatan masyarakat desa, pengelola wisata yang mungkin diambil dari luar desa, dan hal-hal yang mungkin terjadi diluar kesepakatan.

Dalam pemberdayaan masyarakat ada beberapa upaya pembinaan yang harus dilakukan oleh pemerintah desa, agar program pemberdayaan masyarakat berjalan dengan baik. Menurut Mardikanto dan Poerwoko (2015) ada 4 upaya pembinaan yang dapat dilakukan untuk memenuhi hal tersebut, diantaranya adalah Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan dan Bina Kelembagaan (Mardikanto & Soebiato, 2015).

Bina Manusia dalam konteks pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mengembangkan potensi manusia secara optimal. Menurut Mardikanto, bina manusia merupakan proses pemberdayaan yang menitik beratkan pada pengembangan potensi manusia secara holistik. Proses ini meliputi pembinaan

fisik, mental dan sosial spiritual manusia. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan manusia yang diperlukan untuk mencapai kemandirian dan kemakmurannya (Mardikanto & Soebiato, 2015). Pemerintah Desa Melung telah melakukan proses ini di desanya dengan cara mengadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan minat bakat masyarakat, contohnya pelatihan menanam dan mengolah biji kopi, pelatihan mengelola tanaman hias, dan mendatangkan pelatih tari untuk kelompok kesenian lengger banyumasan di Desa Melung. Pelatihan ini di damping langsung oleh Pokdarwis Desa Melung dan dilakukan secara bertahap. Masyarakat yang sudah mengikuti pelatihan nantinya bisa ikut berpartisipasi dalam pengembangan potensi wisata sesuai dengan bidang yang mereka kuasai. Selain itu, Pokdarwis Desa Melung juga memfasilitasi untuk pelatihan pengelolaan *homestay* untuk masyarakat desa.

Bina Usaha merupakan salah satu proses dalam pemberdayaan masyarakat yang memfokuskan pada suatu usaha membangun, mengembangkan dan mengoptimalkan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka (Mardikanto & Soebiato, 2015). Dalam konteks pemberdayaan masyarakat berbasis desa wisata di Desa Melung, Bina Usaha dilakukan oleh masyarakat dengan pengawasan dari Pemerintah Desa Melung bersama Pokdarwis Desa Melung. Bina Usaha yang dilakukan oleh Masyarakat adalah dengan mengelola *homestay* sebagai salah satu fasilitas yang bisa digunakan oleh wisatawan untuk menginap ketika melakukan kunjungan wisata ke Desa Melung.

Bina Lingkungan merupakan upaya membangun kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan sekitar mereka termasuk dalam menjaga kebersihan lingkungan, mengurangi polusi dan memperbaiki kualitas sumberdaya yang ada (Mardikanto & Soebiato, 2015). Dalam konteks pemberdayaan masyarakat berbasis desa wisata di Desa Melung, hal ini dilakukan oleh masyarakat Desa Melung dalam kegiatan kerjabakti masal yang dilakukan secara rutin untuk menjaga kualitas lingkungan agar tetap baik. Selain itu, BUMDes bersama dengan kelompok masyarakat yang tergabung dalam pengelolaan wisata juga terus berpartisipasi dalam menjaga keindahan tempat wisata dengan terus memperhatikan kebersihan toilet umum, jalan menuju lokasi wisata, tempat parkir dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya. Dalam hal ini, Mardikanto juga menekankan pada pentingnya kolaborasi antara

pemerintah dan masyarakat desa serta *stakeholders* yang terkait dalam proses pemberdayaan masyarakat berbasis desa wisata ini. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa upaya-upaya yang mereka lakukan dalam bina lingkungan bisa berjalan efektif dan efisien serta bisa menjadi program berkelanjutan di masa yang akan datang.

Bina kelembagaan menurut Mardikanto & Subianto (2015) merupakan suatu tahapan yang diartikan sebagai upaya untuk membangun dan mengembangkan kelembagaan yang ada di masyarakat agar mampu berperan sebagai agen perubahan dalam upaya pemberdayaan. Dalam hal ini, ada beberapa prinsip dasar yang tidak boleh dilupakan seperti; partisipasi aktif dari masyarakat, pembangunan kelembagaan yang memang harus didasarkan oleh kepentingan masyarakat, memperhatikan aspek keberlanjutan jangka panjang dan bisa mendorong kerjasama dan kemitraan yang sehat antara kelembagaan dan masyarakat. Dalam bukunya, Mardikanto & Subianto (2015) juga menjelaskan bahwa dalam proses ini, diperlukan fasilitator dan mediator agar dapat membantu masyarakat dalam membentuk kelembagaan yang efisien (Mardikanto & Soebiato, 2015).

Proses bina kelembagaan di Desa Melung sudah dilakukan sejak tahun 2017 saat mereka mulai merintis potensi desa wisata. Namun, pihak Pemerintah Desa Melung pada saat itu kesulitan untuk mendapatkan partisipasi aktif dari masyarakat sehingga keputusan yang diambil adalah keputusan *Top Down* yang berasal dari pemerintah desa kepada masyarakat dan kemudian lahir lah BUMDes yang turut memberikan ide-ide untuk pembangunan desa dan dua tahun berikutnya terbentuk Pokdarwis yang juga fokus terhadap perkembangan pemberdayaan masyarakat berbasis desa wisata di Desa Melung. Saat ini mereka berkolaborasi untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap potensi desa, khususnya desa wisata yang saat ini sedang dijalankan di Desa Melung. Saat ini, partisipasi masyarakatnya sudah mulai meningkat. Hal ini terlihat dari keikutsertaan masyarakat dalam pemasaran wisata dan pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh desa. Peningkatan partisipasi masyarakat ini dapat terjadi karena terus dilakukannya pendampingan dan pembagian tugas yang jelas dari masing-masing *stakeholders*. Walau belum mencapai 100% tapi kini BUMDes Melung menyatakan bahwa partisipasi masyarakat sudah jauh meningkat dari awal tahun 2017.

Penutup

Kolaborasi *stakeholders* dalam pemberdayaan masyarakat berbasis desa wisata di Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng berjalan dengan baik dan memegang prinsip dari rakyat oleh rakyat dan kembali kepada rakyat. Pemerintah desa bekerjasama dengan BUMDes, Pokdarwis dan masyarakat desanya, mereka sangat bersinergi dan satu tujuan untuk pengembangan desa wisata ini. Mereka sependapat bahwa pemberdayaan masyarakat berbasis desa wisata ini dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan ekonomi, sosial dan lingkungan bagi masyarakat lokal. Mereka memiliki sifat saling percaya atas pihak-pihak yang terkait. Proses komunikasi yang terjadi antar *stakeholders* juga berjalan dengan baik karena mereka rutin untuk mengadakan pertemuan yang membahas mengenai perkembangan desa wisata.

Sejak memulai di Tahun 2017, Desa Melung sudah berkolaborasi dengan berbagai *stakeholders* yang sesuai dengan bidangnya. Pemerintah Desa Melung tidak lagi mau untuk berkolaborasi dengan pihak swasta karena dirasa kurang memberikan dampak baik bagi keberlanjutan programnya. Dalam hal ini, Pemerintah Desa Melung ingin membuat masyarakat lebih berpartisipasi untuk membangun desa. Namun, ada beberapa kebijakan dari Pemerintah Desa Melung yang sifatnya *top down*, seperti contohnya untuk pengelolaan *homestay*. Pengelolaan *homestay* dilakukan oleh masyarakat desa yang kebanyakan berasal dari keluarga perangkat desa, hal ini dilakukan karena kurangnya partisipasi masyarakat dan fasilitas di rumah penduduk desa yang kurang memadai jika dijadikan *homestay*. Saat ini, Desa Melung telah memiliki beberapa pilihan wisata seperti; wisata alam pagubugan yaitu wisata alam buatan yang bisa dikunjungi kapan saja oleh wisatawan, kemudian ada wisata budaya seperti pentas ebeg, ruwat bumi dan lengger, serta wisata edukasi untuk pembuatan kopi dan pelatihan tanaman hias yang bisa dinikmati saat wisatawan membeli paket wisata.

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih untuk informan dari Pemerintah Desa Melung dan Direktur BUMDes Melung serta Pokdarwis Desa Melung yang telah memberikan informasi terkait penelitian ini. Terimakasih juga untuk Dian Nastiti yang sudah membantu dalam penulisan artikel ini.

Pendanaan

Penulis tidak menerima bantuan pembiayaan untuk penelitian, kepenulisan (authorship), dan publikasi dari pihak manapun.

Daftar Pustaka

- Atok, A., Santoso, P., Jenderal, D., Daerah, O., Dalam, K., & Wisata, D. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Desa Wisata. *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintah*, 7(November), 33–48.
- Berliandaldo, M., Chodiq, A., & Fryantoni, D. (2021). Kolaborasi dan Sinergitas Antar Stakeholder dalam Pembangunan Berkelanjutan Sektor Pariwisata Di Kebun Raya Cibinong. *INOBIIS: Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia*, 4(2), 221–234. <https://doi.org/10.31842/jurnalinobis.v4i2.179>
- Keputusan Bupati Banyumas Nomor 556/167/Tahun2020, Pub. L. No. Nomor 556/167/Tahun2020, Kabupaten Banyumas 2 (2020).
- Ciptaningsih, R., & Nurcahyanto, H. (2019). Kolaborasi Stakeholders Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Wonoyoso, Kecamatan Pringapus,. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 8(1). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/22729/20782>
- Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (2007). *Business Research Methods : Empirical investigation* (17th ed.).
- Djamaludin. (2017). *Kolaborasi Multi Stakeholder Dalam Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pengembangan Kawasan Minapolitan Berbasis Udang (Studi Kasus Di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang)*. Universitas Hasanuddin.
- Humas Kemensetneg. (2019, April 9). Pariwisata, Lokomotif Baru Penggerak Ekonomi Indonesia. *Kementerian Sekretariat Negara*. https://www.setneg.go.id/baca/index/pariwisata_lokomotif_baru_penggerak_ekonomi_indonesia
- Itah Masitah. (2019). Pengembangan Desa Wisata Oleh Pemerintah Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 6, 3.
- Kushandajani, & Permana, I. A. (2020). Inovasi Pemberdayaan Masyarakat Desa:

- Peran Kepemimpinan Lokal dalam Perspektif Antar Aktor. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(1). <https://doi.org/DOI: 10.14710/jiip.v5i1.7318>
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2015). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Mulyana, M., Pawan, A. P., & Maabuat, E. E. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Tondok Bakar Di Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, 7(November), 16–32. <https://doi.org/10.33701/j-3p.v7i2.2797>
- Noorsy, I. (2007). *Maksimalkan Potensi Petani dan Ekonomi Desa*. Suara Karya.
- Prafitri, G. R., & Damayanti, M. (2016). Kapasitas Kelembagaan Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus: Desa Wisata Ketenger, Banyumas). *Jurnal Pengembangan Kota*, 4(1), 76. <https://doi.org/10.14710/jpk.4.1.76-86>
- Sugiyono. (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2036.2009.03946.x>
- Suherlan, H., Adriani, Y., Evangelin, B. C., & Rahmatika, C. (2022). Keterlibatan Masyarakat dalam Mendukung Program Desa Wisata : Studi Deskriptif Kualitatif pada Desa Wisata Melung , Kabupaten Banyumas. *BARISTA: Jurnal Kajian Bahasa dan Pariwisata*, 9, 99–111. <https://doi.org/10.34013/barista.v9i01.623>
- Wirdayanti, A., Asri, A., Anggono, B. D., Hartoyo, D. R., Indarti, E., Gautama, H., S, H. E., Harefa, K., Minsia, M., Rumayar, M., Indrijatiningrum, M., Susanti, T., & Ariani, V. (2021). *Pedoman Desa Wisata*. Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investas. <https://www.ciptadesa.com/2021/06/pedoman-deswa-wisata.html>
- Yin, R. K. (1994). *Case study research: Design and Methods*. First release. In *Thousand Oaks: Sage*. <https://doi.org/10.1080/09500790.2011.582317>

Daftar Narasumber

- Khoirudin, Kepala Desa Melung 2019-2025, Wawancara 5 Januari 2023, Pukul 10.00 WIB.
- Timbul Yulianto, Sekretaris Desa Melung dan Ketua Kelompok Sadar Wisata Desa Melung, Wawancara 13 Januari 2023, Pukul 13.00 WIB.
- Karim, Direktur Badan Usaha Milik Desa Melung Tahun 2017 hingga saat ini, Wawancara 17 Januari 2023, Pukul 16.00 WIB.